

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab”. Sebagai manifestasi dari fungsi dan tujuan pendidikan, pemerintah telah menggratiskan biaya sekolah, dan melaksanakan wajib belajar.

Pendidikan dapat diartikan sebagai hasil peradaban bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup itu sendiri (nilai dan norma masyarakat) yang berfungsi sebagai filsafat pendidikannya. Didalam peradaban suatu masyarakat terjadi sebuah proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan dan mengembangkan hidupnya.¹

¹ Hafid A, Ahiri J, Haq P, *Pengertian Konsep Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2013

Daerah perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga yang fungsi utamanya adalah mempertahankan kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga baik berbatasan darat maupun laut. Salah satu daerah yang termasuk dalam daerah perbatasan adalah Kecamatan Sebatik Tengah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia yang memiliki karakter sosial budaya, ekonomi dan potensi. Adanya interaksi langsung dan insentif antara warga negara Indonesia dengan warga negara tetangga yang berupa hubungan-hubungan kultural secara tradisional maupun kegiatan-kegiatan ekonomi modern.

Pada saat ini pendidikan di Kecamatan Sebatik Tengah adalah wilayah yang tertinggal dari segi infrastruktur. Upaya pemerintah dalam meratakan pendidikan yaitu Pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan telah melakukan Pembangunan pada bidang pendidikan yang dilaksanakan dengan kebijakan:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan sumber Daya Aparatur
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini
5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
6. Program Pendidikan Menengah
7. Program Pendidikan NonFormal

8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan
9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
10. Program Akhir Sekolah Ujian Nasional
11. Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berikut ini tabel kondisi pendidikan di daerah Kecamatan Sebatik Tengah:

Tabel 1.1
Jumlah Siswa di Kecamatan Sebatik Tengah

Jenjang Pendidikan	Tahun Ajaran		
	2017-2018	2018-2019	2019-2020
SD	867	878	869
SMP	388	377	393

Sumber: Dinas Pendidikan pada tahun 2017

Berdasarkan uraian data diatas diketahui bahwa Sekolah-sekolah yang ada pada daerah Kecamatan Sebatik Tengah keadaannya masih sangat minim untuk memenuhi standar pendidikan. Banyaknya kekurangan ketersediaan fasilitas seperti 1) sarana dan prasarana, ruang kelas, ruang laboratorium dan ruang perpustakaan yang terbatas, 2) Jumlah buku yang masih minim untuk siswa, 3) Tenaga pendidik atau guru yang masih minim. Hal ini membuktikan bahwa kualitas siswa di Kecamatan Sebatik Tengah masih sangat jauh dari apa yang

diharapkan karena belum bisa bersaing dengan siswa yang berada di kota. Hal ini menarik untuk diteliti oleh penulis, tentang kebijakan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan yang mengeluarkan kebijakan dan program peningkatan kualitas siswa pada daerah perbatasan khususnya Kecamatan Sebatik Tengah, maka penulis memilih judul ***“Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Siswa Di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia Tahun 2020”***.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan dalam meningkatkan kualitas siswa di daerah perbatasan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk dapat mengetahui bentuk implementasi kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan kualitas siswa.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadikan acuan dari teori yang dipelajari khususnya dalam hal kebijakan suatu program Pemerintah sehingga dapat berguna dari segi pemahaman, penalaran dan pengalaman penulis, serta pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik khususnya Ilmu Pemerintahan, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah Kabupaten Nunukan dapat dijadikan sebagai acuan dalam kebijakan meningkatkan kualitas siswa di daerah perbatasan dan menjadikan tolak ukur dari tahun sebelumnya untuk tahun berikutnya dalam menyusun program-program untuk meningkatkan kualitas siswa.

Bagi masyarakat Kecamatan Sebatik Tengah sebagai salah satu sarana informasi untuk mengetahui tentang Program-program Pendidikan yang dapat digunakan sebagai pengetahuan tambahan serta pemahaman proses kebijakan pendidikan di daerah perbatasan tersebut.

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti sendiri tentang pendidikan dan kualitas siswa.

D. Studi Terdahulu

1. Studi terdahulu Supardi U.S mengenai Arah Pendidikan Di Indonesia.

Arah pendidikan bangsa Indonesia bersifat utuh dan menyeluruh meliputi semua ranah pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan semua potensi yang ada dalam diri peserta didik. Mahyudi (2012) mengatakan, disamping untuk meningkatkan intelektualitas dan kependaian, proses pendidikan juga harus dijiwai dengan nilai-nilai peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, karena arah pendidikan nasional kita yang telah diatur dalam Undang-Undang. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas intelektual tetapi Pendidikan juga harus diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas sosial, cerdas pribadi, cerdas spiritual, dan cerdas kinestesisnya.

Pendidikan juga sebagai usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terpola, dan dapat dievaluasi yang dilakukan oleh pendidik untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Dalam tataran kebijakan arah pendidikan bangsa Indonesia sebenarnya sudah sangat jelas, arah kebijakan pendidikan telah diatur dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, batang tubuh UUD 1945 hasil amendemen pasal 31 ayat (3), dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdik pasal 3. Arah kebijakan pendidikan Indonesia tampaknya baru sebatas slogan, praktik pendidikan yang berlangsung pada saat ini masih belum mencerminkan atas kebijakan

pendidikan yang telah dikeluarkan, secara faktual masih belum dapat menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing.

2. Tunas asa, terkait Masalah Kualitas Pendidikan

Di Indonesia hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada saat ini kualitas pendidikan hingga masih tergolong buruk, berbagai faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di Indonesia, beberapa faktor-faktor penghambat tersebut antara lain:

- a. Faktor geografis Indonesia yang mengakibatkan terhambatnya sebagai pendorong kemajuan kualitas atau pendidikan.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai yang mengakibatkan kurang lancarnya proses belajar mengajar.
- c. Rendahnya kualitas prestasi siswa yang terkendala sehingga mutu pendidikan menjadi turun.

Masalah pendidikan ini belum dapat diselesaikan secara maksimal sehingga keadaan pendidikan di Indonesia masih buruk hingga sekarang ini. Adanya perhatian khusus untuk kendala-kendala tersebut hanya ada pada daerah-daerah yang sudah maju, dan hanya fokus pada satu titik sehingga daerah-daerah yang seharusnya mempunyai potensi yang bagus menjadi kurang terexplorasi dan kurang memiliki standar yang sesuai dengan daerah-daerah yang sudah memiliki standar yang kompeten.

3. Studi terdahulu, Andi Nurlela, Maria Pandu, Syaifullah Cangara terkait Strategi kelangsungan Hidup Masyarakat Sebatik Tengah.

Kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan Aji Kuning yang miskin infrastruktur dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik, pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurut Soekanto (1990), ada dua sumber perubahan sosial yaitu sumber di dalam masyarakat itu sendiri dan sumber perubahan dari luar masyarakat. Ada perubahan yang dikehendaki (*intended change*) dan ada yang tidak dikehendaki (*intended change*). Kawasan perbatasan di Aji Kuning dalam hal ini, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, pada umumnya berkiblat ke wilayah negara tetangga yaitu Tawau Malaysia yang merupakan anak negeri dari negara Malaysia. Hal ini disebabkan adanya infrastruktur yang lebih baik atau pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat dari wilayah negara tetangga. Ketersediaan prasarana dan sarana di desa Aji Kuning, baik sarana dan prasarana wilayah maupun fasilitas sosial ekonomi masih jauh dari memadai. Jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat maupun laut masih sangat terbatas, yang menyebabkan sulit berkembangnya kawasan perbatasan, karena tidak memiliki keterkaitan sosial maupun ekonomi dengan wilayah lain.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat ada yang bekerja sebagai petani sawah dan nelayan tradisional, pedagang pasar, pamotoro' antar desa ke Tawau dan ada juga yang bekerja sebagai buruh di Malaysia.

Karena tidak adanya pemberdayaan dari pemerintah maka itu hasil tani maupun tangkapan mereka, lebih memilih menjual ke para tengkulak atau kalau di Aji Kuning disebut dengan Pa 'borong untuk di bawah ke Malaysia. Dengan kondisi seperti ini masyarakat desa Aji Kuning dan sekitarnya di ibaratkan miskin di desa yang penuh dengan hasil tani. Mengapa seperti itu, ini dikarenakan hampir semua hasil-hasil mereka di jual ke Malaysia sehingga kebutuhan masyarakat setempat sendiri tidak terpenuhi.

4. Studi terdahulu oleh Muhammad Ramadhan Raga R, Alfian Tri Permana, Muhammad Ilham, Muhammad Teguh Arifiawan, terkait Peranan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Peranan pemerintah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi Pendidikan di suatu daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan yang dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kajian ini menganalisis tentang pemerintahan daerah dalam proses pelaksanaan otonomi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang diketahui bahwa peranan pemerintah daerah masih sangat lemah. Hal ini disebabkan karena penyebaran guru dan bantuan dana pendidikan belum rata, tingkat pengawasan yang rendah, partisipasi masyarakat di dalam hal pendidikan masih sangat kurang.

Dalam hal meningkatkan mutu pendidikan suatu negara membutuhkan campur tangan dari pemerintah dan aspek masyarakat yang mendukung jalannya sistem pendidikan di Indonesia. Sebagai pemangku kebijakan di suatu daerah, pemerintah sudah sepatutnya mampu mencetak lulusan atau generasi penerus bangsa yang bermutu dan berdaya saing tinggi. Pemerintah dari setiap daerah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing untuk melaksanakan kegiatan pendidikan tersebut, dimana pendidikan perlu di samakan fasilitasnya di setiap wilayah, sehingga perlu dilakukan pembagian kewenangan.

5. Studi terdahulu oleh Elsje Theodora Maasawet tentang Pengembangan Model Pengelolaan Kelas Untuk Sekolah Dasar Yang Mengalami Kekurangan di Daerah Perbatasan Atau Terpencil Di Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sistem Pendidikan Kalimantan Timur belum mampu untuk menyebarkan guru SD secara merata hingga ke pelosok tanah air. Padahal jumlah guru SD secara keseluruhan tidaklah termasuk kurang. Akibatnya, terjadilah kekurangan guru secara lokal di mana-mana, khususnya di daerah kecil, sulit dan terpencil seperti Sebatik Tengah.

Permasalahan kelangkaan guru yang terjadi di Sebatik Tengah dinsinyalir disebabkan antara lain karena pendistribusian guru yang belum merata. Selain itu, beberapa tenaga guru lebih memilih untuk mengajar di sekolah-sekolah yang berlokasi di ibukota Kabupaten ketimbang mengajar di Kecamatan Sebatik Tengah. Dan permasalahan yang nampak pada siswa-

siswa akibat pengelolaan kelas yang selama ini terjadi jika mengalami kekurangan guru adalah guru tidak dapat mengontrol sepenuhnya siswa yang diberinya tugas karena guru tidak berada di kelas saat siswa mengerjakan tugas yang diberikannya. Akibatnya dapat menimbulkan permasalahan pada motivasi belajar siswa karena baik siswa yang aktif maupun siswa yang tidak aktif tidak terekam oleh guru sehingga tindakan yang diambil guru cenderung menyamaratakan kemampuan siswa.

Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nunukan harus melakukan pendistribusian ulang tenaga pendidik dan melakukan rekrutmen tenaga guru melalui formasi CPNSD agar tujuan dari pembangunan nasional khususnya di sektor pendidikan dapat tercapai. Selain itu, perlu ada peningkatan fasilitas dan insentif bagi guru yang mengajar di daerah perbatasan dan juga memerlukan pengelolaan Kelas Rangkap. Model pengelolaan kelas rangkap yang sesuai untuk mengatasi permasalahan di SD pulau sebatik akibat mengalami kekurangan guru adalah model pengelolaan kelas 221 dalam artian guru mengajar dua kelas, dua mata pelajaran di dalam satu ruangan. Model ini dianggap sesuai dengan keadaan di pulau sebatik yang belum pernah menerapkan model pengelolaan kelas rangkap karena model pengelolaan 221 adalah model yang paling sederhana dari ketiga model dalam pengelolaan kelas rangkap.

6. Studi terdahulu oleh Iskandar Agung tentang Kajian Penyelenggaraan Pendidikan Di daerah Perbatasan.

Pada dasarnya kondisi daerah perbatasan memerlukan sentuhan penyelenggaraan pendidikan bermutu agar mampu meningkatkan kualitas SDM-nya. Melalui peningkatan kualitas SDM ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk guna meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidup masyarakat di daerah perbatasan yang berwawasan dan berkarakter kebangsaan yang tinggi. Upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di daerah perbatasan tidak akan terwujud apabila tidak disertai dengan peningkatan segenap aspek pendidikan di dalamnya. Masukan siswa, Sarana dan prasarana, Ketenagaan, Biaya Pendidikan, dan kurikulum Pendidikan terbukti berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.

Disamping itu upaya pembangunan pendidikan di daerah perbatasan pun perlu diimbangi dengan pembentukan dan pengembangan Wawasan Kebangsaan penduduk di wilayah ini, terutama terhadap anak usia sekolah. Upaya pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi peserta didik/siswa di daerah perbatasan merupakan hal yang mendesak untuk dilaksanakan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kondisi Wawasan Kebangsaan peserta didik berada pada kategori yang kurang memuaskan, dan diprediksi rentan terpengaruh oleh unsur asing. Rangsangan eksternal relatif mudah mempengaruhi kehidupan peserta didik/siswa daerah perbatasan, baik yang

bersifat ideologis, politis, ekonomis, sosial-budaya, maupun pertahanan-keamanan.

7. Studi terdahulu oleh Syachrumasyah Asri terkait Kebijakan Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Wilayah Perbatasan.

Cita-cita pemerintah Kalimantan Timur adalah menempatkan daerah perbatasan sebagai beranda depan. Sebagai konsekuensi maka pembangunan di daerah perbatasan harus ditingkatkan, termasuk pula adalah pembangunan bidang pendidikan. Pembangunan pendidikan di daerah perbatasan ke depan didasarkan pada paradigma pembangunan manusia kalimantan Timur seutuhnya dan pembangunan nasional Indonesia, sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaannya secara optimal. Dimensi kemanusiaan tersebut meliputi: keteguhan iman dan ketakwaan, unggul dan berbudaya.

Pada dasarnya keadaan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan di daerah perbatasan masih rendah dan perlu ditingkatkan, kemudian tenaga pengajar bagi sekolah-sekolah di perbatasan dinilai belum memadai, selanjutnya peran orang tua memandu putra-putrinya sangat penting. Pada saat ini pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur telah sesuai dengan harapan, termasuk bagi daerah perbatasan. Terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi dalam bidang pendidikan, pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak seluruhnya berjalan baik, di lokasi penelitian pelaksanaan kebijakan berjalan normative

(cukup) dan masih harus ditingkatkan guna memperoleh kualitas pendidikan yang lebih baik.

Maka peran serta pemerintah dalam membangun pendidikan di daerah perbatasan Kalimantan Timur sangat diperlukan. Apabila perencanaan dilakukan tergesa-gesa dan sering memaksakan kuantitas, akan membuat tidak sesuai dengan permintaan kualitas yang akan menyulitkan sekolah mengembangkan tenaga pendidik yang sesuai.

8. Studi terdahulu oleh Very Y. Londa tentang Implementasi Kebijakan Dasar Daerah Kepulauan (Studi di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara).

Kabupaten Kepulauan Talaud yang memiliki 20.209 jiwa penduduk usia sekolah atau 24.38% dari jumlah penduduk menghadapi permasalahan yang antara lain kurangnya guru yang bersedia ditempatkan di daerah, kurangnya sarana fisik baik berupa gedung, alat peraga bidang studi, peralatan laboratorium, buku-buku pelajaran dan peralatan pelajar lainnya, tidak lengkapnya data kependidikan untuk menunjang program online jardiknas. Implementasi kebijakan pendidikan dasar di Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan dimensi idealised policy, targets, Implementasing organization serta Environmental factor belum sepenuhnya berjalan dengan baik pada dimensi idealised policy, Implementing organization dan Environmental factor khususnya lingkungan lembaga politik. Keberhasilan dalam implementasi kebijakan pendidikan dasar di Kabupaten Kepulauan Talaud

berada pada dimensi target group yang dalam hal ini peserta didik yang termasuk didalamnya peran dari orang tua. Keberhasilan dalam implementasi kebijakan pendidikan dasar melalui siswa dan peran orang tua banyak berkaitan dengan peran orang tua dalam mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar.

Sementara itu environmental factor melalui lingkungan politik dari lembaga legislative daerah sebagai dimensi yang belum banyak terlihat perannya dalam banyak membantu pencapaian pelaksanaan kebijakan pendidikan dasar. Maka disarankan untuk melakukan perbaikan pada penyusunan dan penetapan program yang sesuai kebutuhan untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan dasar seperti ketersediaan tenaga pendidik, ketersediaan sarana kegiatan pembelajaran dan biaya operasional, menempatkan pejabat yang tepat sesuai dengan kemampuan dan keahlian pada bidang pendidikan dasar, melakukan analisis lebih lanjut mengenai lemahnya dukungan lingkungan politik (DPRD) pada kebijakan pendidikan dasar.

9. Studi terdahulu oleh Becti Sukesti terkait Implementasi Kebijakan Distribusi Sumberdaya Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.

Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo mempunyai visi “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Berkarakter dan Berprestasi Berdasarkan Budaya dan Sumber Daya Lokal”. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon

Progo memiliki misi sebagai upaya yang akan dilaksanakan yaitu: a) Meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan; b) Meningkatkan manajemen pendidikan dan SDM pendidik dan tenaga kependidikan.

10. Studi terdahulu Siti Muri'ah tentang Strategi Pengembangan Pendidikan Wilayah Perbatasan (Studi Kasus Pada Madrasah Ibtidaiyah Tapal Batas Sebatik dan Nunukan).

Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan bagi seluruh warga sudah menjadi kewajiban negara untuk melaksanakannya. Program WAJARDIKNAS 9 Tahun tentunya banyak mengalami kendala, salah satu yang cukup krusial menurut peneliti adalah pemerataan pendidikan untuk wilayah perbatasan. Posisi perbatasan akhir-akhir ini masih tampak permasalahan klasik yang belum terselesaikan terkait masalah pendidikan dan kesejahteraan pendidik. Ini merupakan wilayah khusus yang menjadi prioritas Negara dalam membangun bangsa yang berkeadilan. Hal ini masih jauh dari amanat UUD 1945 pasal 34 dimana setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Merupakan kewajiban bagi Negara untuk memastikan bahwa masyarakat yang berada di daerah pekotaan dan wilayah perbatasan memiliki kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan yang layak.

Progress pendidikan serta langkah yang telah dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan di perbatasan dengan berbagai kompleksitasnya diselenggarakan melalui strategi sekolah dalam

melakukan pengembangan, strategi membangun kemitraan dan faktor yang menjadi kendala. Strategi yang dikembangkan adalah *Boarding School*. Strategi sekolah dalam membangun kemitraan adalah dengan: relevansi (pendidikan yang diselenggarakan dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap bentukan siswa ketika mereka bersekolah baik pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik). Faktor yang menjadi kendala adalah faktor geografis karena infrastruktur yang sangat terbatas serta jarak yang cukup jauh. Selain itu, minimnya tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, karena kesadaran para calon tenaga pendidik dan kependidikan untuk mau mengabdikan di wilayah perbatasan dsb.

11. Studi terdahulu oleh Lia Rosliana, Fani Heru W, Wildan Lutfie, Kemal Hidayah dan Tri Noor Aziza terkait Manajemen Perbatasan Fokus Inovasi Pendidikan di Perbatasan Kalimantan Utara.

Keberadaan Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara lain. Terdapat berbagai isu penting di perbatasan, antara lain: Isu Batas Negara Pertahanan dan Kecamatan Daerah Perbatasan. Isu -isu ini sudah terjadi sekian lama tetapi belum juga terselesaikan. Berdasarkan isu yang ada masalah pendidikan merupakan masalah dasar dan prioritas dalam pembangunan daerah perbatasan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa isu pendidikan merupakan isu yang *urgent* untuk diangkat menjadi sebuah kajian di daerah perbatasan.

Kondisi pendidikan di daerah perbatasan: Fasilitas (kekurangan kelas sehingga ada yang masuk pagi dan siang, Di Sebatik Tengah (SMP) ruang perpustakaan serta ruang laboratorium dan asrama digunakan sebagai kelas, sudah ada asrama tetapi kapasitasnya terbatas, Gedung SMA di Sebatik Tengah masih memanfaatkan Gedung SD dan SMP). Pengajar (kekurangan tenaga pengajar dan tunjangan dari pemerintah pusat ataupun pemda bersifat temporer). Siswa (juga berasal dari anak-anak TKI). Lingkungan (sebagian besar orangtua siswa bekerja sebagai tenaga kerja diperkenanan Malaysia). Kurikulum (menggunakan kurikulum Nasional 2006). Maka diketahui terdapat kesenjangan antara kondisi saat ini dan yang seharusnya pada masalah pendidikan di wilayah perbatasan.

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga inovasi yang ada di lokus penelitian yaitu Sekolah Tapal Batas, Sekolah Filial dan juga Sarjana mengajar, ketiganya dikategorikan inovasi karena memenuhi unsur kebaharuan dan kemanfaatan sebagai syarat utama sebuah inovasi.

12. Studi terdahulu oleh Kardius Richi Yosada terkait Pendidikan di Beranda Terdepan Negara Perbatasan Entikong.

Kondisi pendidikan anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan perbatasan Entikong sangat paradoks dengan gemerlapnya pendidikan di kota-kota besar. Di saat siswa di sekolah-sekolah perkotaan asyik disuguhkan oleh ruang kelas yang serba mewah, pendidikan di kawasan perbatasan

Entikong hanya mampu menyediakan fasilitas yang jauh dari kata cukup. Di saat siswa di sekolah-sekolah perkotaan dimanjakan oleh berbagai kemudahan akses fasilitas pendidikan, siswa di kawasan perbatasan Entikong masih saja berkuat dengan buku-buku usang yang tidak layak baca.

Berbagai faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di kawasan perbatasan Entikong seperti kurangnya tenaga guru, minimnya fasilitas dan sarana prasarana, maupun rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan turut andil dalam menciptakan jurang pemisah dengan kondisi pendidikan di perkotaan. Berbagai upaya harus segera ditempuh guna meminimalisir jurang pemisah tersebut antara lain misalnya, penambahan jumlah guru, pengadaan fasilitas dan sarana prasarana sekolah, memperjelas regulasi dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah maupun adanya usaha dan kegiatan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Sudah saatnya dan selayaknya pendidikan di kawasan perbatasan Entikong mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak agar stigma kawasan perbatasan Entikong sebagai beranda terdepan negara dalam menjaga keutuhan NKRI justru menjadi tembok keterbelakangan di bidang pendidikan.

13. Studi terdahulu Silvia Amanah dan Desi Nurhikmahyanti tentang Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SDN 2 Sidokumpul Gresik.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah dengan diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS

merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada kepala sekolah untuk menyediakan pendidikan yang baik dan memadai bagi para peserta didik.

SDN 2 Sidokumpul Gresik adalah salah satu institusi pendidikan dasar yang terfavorit di Kota Gresik. Dengan adanya sistem MBS maka di sekolah SDN 2 Sidokumpul Gresik mengalami kemajuan atau prestasi. Dalam penerapan MBS SDN 2 Sidokumpul Gresik menggunakan Tujuh komponen dalam MBS: Manajemen Kurikulum, Manajemen Humas, Manajemen Layanan Khusus, Manajemen Peserta Didik, Manajemen Tenaga Kependidikan, Manajemen Kesiswaan, Manajemen Keuangan dan Pembiayaan. Dari ketujuh kompponen tersebut MBS di SDN 2 Sidokumpul Gresik bisa meningkatkan prestasi akademik dan non akademik.

Dalam penerapan MBS SDN 2 Sidokumpul mengalami faktor penghambat dalam melaksanakan MBS yaitu dana dan aturan dari pemerintah. Sedangkan faktor pendorongnya adalah pihak ekolaj bekerja sama dengan wali murid untuk memajukansekolah.

14. Studi terdahulu oleh M Viqy Saputra Misya terkait Upaya Pemerintah daerah Dalam Meningkatkan Pendidikan di Komunitas Adat Terpencil Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2014.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten baru sebagai pemekaran dan Kabupaten Bengkallis dan pembentukannya telah ditetapkan

berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2009 tentang Pembentukan Kepulauan Meranti sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Riau. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah berusaha meningkatkan pendidikan dengan cara membangun sekolah-sekolah baik itu sekolah setara tingkat SD, SMP, SMA/SMK/MA disetiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, namun jarak antara sekolah dengan desa-desa yang ada di Kecamatan cukup jauh sehingga masih banyak KAT yang tidak bisa bersekolah dan putus sekolah.

Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendidikan di Komunitas Adat Terpencil Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2014 adalah dengan (Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal Paket A, B dan Program Keaksaraan Fungsional dan Keterampilan Fungsional, khusus untuk KAT yang bersuku suku asli di Desa Sesap. Pemberian Beasiswa Murid Msikin. Pembangunan asrama Pelajar Suku Ali / KAT. Sosialisasi Pendidikan Kepada Masyarakat KAT. Serta Kebijakan Kelonggaran-kelonggaran Peraturan.

15. Studi terdahulu oleh Endah Rantau Itasari tentang Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara Indonesia di Perbatasan Darat Antara Indonesia dan Malaysia.

Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah dijadikan telaah kajian dan inisiasi peningkatan pemenuhan hak atas pendidikan oleh Kemdikbud sejak tahun 2009 khususnya di wilayah perbatasan dengan Malaysia. Minimnya

sarana dan prasarana, rendahnya keinginan bersekolah, keengganan pelaku pendidikan melaksanakan tugas dan fungsi pendidik dan rendahnya alokasi dana pendidikan telah menyebabkan ketertinggalan dan ketimpangan memperoleh akses pendidikan di wilayah-wilayah perbatasan tersebut (Marzuki; 2011). Sebagian besar wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia juga termasuk sebagai Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (D3T) yang saat ini menjadi prioritas pembangunan sesuai dengan visi Nawacita dari Presiden Joko Widodo

Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di Kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2005 sampai 2007 telah secara bertahap dipenuhi oleh pemerintah. Pemenuhan secara bertahap tersebut merupakan pelaksanaan kedaulatan negara sebagai bentuk tanggung jawab untuk menghormati pelaksanaan agenda global dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang telah digunakan untuk mengontestasi agenda tersebut dalam pembuatan hukum, kebijakan, program dan pendanaan. Asdsad

16. Studi terdahulu oleh HAerudin terkait Strategi Pengembangan Madrasah Tsnowiyah Swasta Terhadap Kualitas Pendidikan Islam di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

Keberhasilan dan kegagalan madrasah dalam melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran lebih banyak ditentukan oleh aspek substansial, misalnya dana, kualitas guru dan murid, serta sarana dan prasarana dimiliki yang sampai sekarang ini masih tetap memperhatikan. Untuk itu unsur

substansial di atas tetap dikaji dan diteliti, dan hasil penelitiannya sebagai bahan pengembangan dan kritik dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah.

Di luar kebijakan kurikulum, penyelenggaraan pendidikan di madrasah mengalami kendala pengelolaan teknis yang tidak ringan, yakni tentang sumber daya manusia berupa tenaga kependidikan dan *input* peserta didik, serta sumber daya finansial yang selama ini masih bergantung pada dana proyek. Di madrasah kualitas mutu pendidikan tidak terjamin bila dibandingkan dengan sekolah umum, kualitas pendidik rendah, kurang professional, keterbatasan sarana prasarana pendidikan, populasi siswa yang minim, latar belakang siswa yang keterbelakangan dan kurang mampu serta tingkat daya nalar siswanya yang kurang berkualitas dan masih ada beberapa amsalah yang patut dicermati, antara lain masih adanya dualism dalam system Pendidikan di Indonesia.

Strategi pengembangan Madrasah Tsanawiyah di Kec. Tellulimpoe sebagai sub-sisitem pendidikan nasional dimana madrasah mempunyai andil yang besar dalam mencerdaskan anak bangsa baik dari segi pengetahuannya maupun pengetahuan agamanya, dengan memasukkan muatan pendidikan dan pendidikan prilaku sosial yang berdasarkan nilai-nilai Islami. Dalam aspek internal di MTs Kec. Tellulimpoe dengan melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pendidik/ guru, tenaga kependidikan, manajemen

pengelolaan pendidikan, mamaksimalkan sistem pengelolaan terpadu, terencana dan terprogram. Dalam aspek eksternal, di sokong dengan sosial masyarakat yang responsif, kebijakan pemerintah yang pro, keuangan dari kementrian yang memadai dan kebutuhan lainnya yang dapat menunjang proses pendidikan.

17. Studi terdahulu oleh Aminatul Zahroh tentang Manajemen Sekolah Unggulan: Strategi Pengembangan Kapasitas Sekolah Menuju Pendidikan Bermutu.

Pengembangan kapasitas mengacu kepada proses dimana individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif untuk melaksanakan fungsi mereka, menyelesaikan masalah mereka, mencapai tujuan-tujuan mereka secara mandiri. Dengan demikian yang dimaksud pengembangan kapasitas pada sekolah unggulan di sini mengacu kepada proses pengembangan kapasitas di lembaga pendidikan unggulan khususnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dalam menjalankan fungsi, menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan-tujuan organisasinya atau dengan kata lain kemampuan lembaga dalam menghadirkan sekolah unggulan.

Upaya-upaya perbaikan sekolah dapat terwujud melalui pengembangan kapasitas (*capacity building*). Pengembangan kapasitas ini juga berkaitan erat dengan organisasi pembelajar (*learning organization*) dan komunitas pembelajar (*learning community*). Dalam konteks lembaga

pendidikan, kapasitas mengacu kepada karakteristik organisasi internal sekolah. Selain itu pengembangan kapasitas adalah sebagai upaya-upaya dengan menciptakan kondisi, peluang dan pengalaman untuk saling kolaborasi dan saling belajar.

Upaya peningkatan kapasitas sekolah terdiri atas tiga komponen inti dari kapasitas organisasi sekolah, yaitu: *Pertama*, pengetahuan dan keterampilan dari individu staf. *Kedua*, komunitas belajar profesional. *Ketiga*, koherensi program, yaitu sejauh mana program-program sekolah untuk belajar para siswa dan staf yang dikoordinasikan, terfokus pada tujuan pembelajaran yang jelas dan berkelanjutan selama periode waktu yang telah ditentukan.

18. Studi terdahulu oleh Filemon Fajar Kusuma, Edy Saptono dan Effendi Sihole terkait Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea Dalam Mendukung Pertahanan Negara (Studi Di Distrik Muara Tami Jayapura).

Kesiapan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam pembangunan desa, khususnya di desa pinggiran Indonesia. Melalui dibuat dan dikembangkannya kawasan ekonomi terpadu di wilayah perbatasan dapat menghidupkan perekonomian masyarakat. Tiap bulannya perputaran uang di Pasar Skouw mencapai Rp 10 miliar. Dampak dari tingginya lalu lintas di perbatasan melalui PLBN Skouw dan tak pernah sepiunya Pasar Skouw membuat pihak keamanan harus ekstra waspada. Sebab sudah beberapa kali terjadi penembakan terhadap warga negara Indonesia oleh orang tidak

dikenal, dan pelaku melarikan diri ke Papua New Guinea dan masih banyak lagi masalah seperti maraknya penyelundupan narotika.

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Distrik Muara Tami, di aspek pendidikan pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan minat sekolah anak-anak di Distrik Muara Tami, angka melek huruf 96,43 persen, angka rata-rata lama sekolah 11,11 tahun, rata-rata angka kelulusan siswa 100 persen. Capaian kinerja pemerintah daerah di bidang kesehatan adalah menurunnya persebaran penyakit menular dan dibangunnya sarana kesehatan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian warga adalah dengan dibangunnya pasar modern di PLBN Skouw. Pasar ini yang nantinya akan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian kawasan perbatasan di Distrik Muara Tami, karena letaknya yang strategis tepat berada di perbatasan negara sehingga warga negara tetangga pun berbelanja di pasar kita.

19. Studi tedahulu oleh Trisandi, Ahmad Afrizal Rizqi tentang Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di Daerah Perbatasan: Studi di SMPN 2 Bokan Kepulauan, Banggai Laut, Sulawesi Tengah.

Pada tahun 2005 pemerintah mendirikan sekolah negeri tingkat SMP di perbatasan Sulawesi Tengah yaitu di Desa Kasuari, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, yang diberi nama SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan. Sekolah tersebut terus melakukan pengembangan terutama dalam meningkatkan mutu sekolah walaupun terdapat beberapa kendala. Kendala

tersebut antara lain letak sekolah yang sangat jauh dari pusat, masalah anggaran dan pengetahuan dalam mengelola sekolah yang sangat minim. Masih ada beberapa masalah yang ditemukan seperti fasilitas sekolah yang minim, kurangnya buku dan abhan praktik, kepemimpinan belum maksimal belum dapat mengelola secara mandiri dan sumber daya manusia belum semuanya tersedia dan siap.

Manajemen Berbasis Sekolah yang diwujudkan melalui Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan faktor kemampuan sumber daya manusia di sekolah tersebut belum mumpuni dalam melaksanakan proses manajemen berbasis sekolah. Manajemen kepala sekolah yang masih kurang, manajemen guru masih perlu adanya perbaikan, letak sekolah yang sangat jauh sehingga belum mampu tumbuh seperti manajemen peningkatan mutu yang diharapkan, sarana prasana masih sangat kurang, dan partisipasi masyarakat yang rendah terhadap sekolah tersebut. Walaupun diberikan otonomi oleh Pemerintah melalui desentralisasi pendidikan, namun SMP Negeri 2 Bokan Kepulauan masih sangat tergantung kepada pemerintah (belum dapat mengelola sekolah secara mandiri). Untuk mensosialisasikan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah perlu adanya bimbingan kepada kepala sekolah, guru dan semua pihak yang terlibat dalam sekolah agar mutu sesuai dengan harapan peserta didik di perbatasan.

20. Studi terdahulu oleh Aylin A'ing terkait Studi Tentang Pembangunan Bidang Pendidikan Di Daerah Perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau.

Permasalahan pembangunan pendidikan yang masih rendah di daerah perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau terutama masalah Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan seperti rumah dinas guru dan sarana olahraga siswa serta perpustakaan sekolah dan Kurangnya tenaga pendidik bagi sekolah diperbatasan serta jauhnya jarak antara sekolah dari tempat tinggal siswa merupakan salah satu kendala meningkatnya mutu pendidikan yang ada diperbatasan.

Pembangunan pada bidang pendidikan di daerah perbatasan Kecamatan Kayan Hulu mengalami kekurangan tenaga guru di beberapa sekolah dalam penempatan guru-guru di setiap sekolah masih belum merata. dari rekrutmen tenaga pendidik sistem yang digunakan adalah guru mengikuti tes CPNS, untuk tenaga kontrak mengikuti tes yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sementara untuk honorer langsung memberi permohonan lamaran kerja ke sekolah yang di tuju. dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana pendidikan seperti perpustakaan, rumah dinas guru dan gedung sekolah yang layak, untuk bantuan oprasional sekolah dalam pemberian bantuan ini sangat tidak diimbangi dengan pembimbingan dan pembekalan manajemen pengelolaan yang baik dan tepat guna dan jumlah bantuan yang diberikan belum cukup

untuk memenuhi semua kebutuhan sekolah yang ada di daerah perbatasan karena di pengaruhi oleh kondisi daerah yang jauh.

Supardi U.S, dalam penelitian ini diketahui hasil bahwa arah kebijakan pendidikan Indonesia sebatas slogan dan praktik pendidikan masih belum mencerminkan atas kebijakan pendidikan dan belum mampu menghasilkan sdm yang dapat bersaing. Keunggulan penelitian ini dibandingkan dari hasil penelitian oleh Supardi U.S adalah pada penelitian ini, agar kualitas siswa terus meningkat secara konsisten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan berkomitmen akan terus melakukan pembangunan pendidikan sampai siswa menjadi sumberdaya yang berkualitas dan mampu bersaing.

Tunas Asa, dalam penelitian ini pendidikannya buruk, prestasi rendah dan kurang diperhatikan oleh pemerintah. Keunggulan [enelitian ini dari Tunas asa adalah dalam penelitian ini pemerintah memberikan perhatian terhadap kualitas siswa yang merupakan bagian dari pendidikan dengan melaksanakan program dan disusul dengan kebijakan, dan mengadakan Kerjasama dengan Universitas.

Andi Nurlela, Maria Pandu dan Syaifullah Cangara, pada penelitian ini ekonomi masyarakat berkiblat ke Tawau Malaysia dan masyarakat di daerah ini miskin karena hasil alam dijual ke negara tetangga dan tidak adanya pemberdayaan. Keunggulan penelitian ini dengan penelitian oleh Andi Nurlela, Maria Pandu dan Syaifullah Cangara adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan pada penelitian ini sangat mengupayakan cara agar masyarakat memiliki pendidikan

sehingga kelak masyarakat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memanfaatkan hasil kekayaan alam sendiri serta tidak akan bergantung pada negara tetangga.

Muhammad Ramadhan Raga R, Alfian Tri Permana, Muhammad Ilham, Muhammad Teguh Arifiawan, dalam penelitian ini diketahui peran pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan lemah, bantuan belum merata, tingkat pengawasan rendah dan peran masyarakat kurang. Diketahui bahwa keunggulan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Muhammad Ramadhan Raga R, Alfian Tri Permana, Muhammad Ilham, Muhammad Teguh Arifiawan adalah Peran pemerintah bagus untuk meningkatkan kualitas siswa, tingkat pengawasan baik karena adanya Kerjasama dengan instansi lain dan peran masyarakat sangat baik dan aktif.

Elsje Theodora Maasawet, pada penelitian ini untuk meningkatkan pembangunan pendidikan hanya fokus dengan pengadaan kelas rangkap. Keunggulan penelitian ini dari penelitian Elsje Theodora Maasawet adalah pemerintah melaksanakan banyak program untuk memotivasi dan menumbuhkan minat belajar siswa sehingga siswa terus aktif dalam belajar, berprestasi baik untuk bidang akademik dan nonakademik.

Iskandar Agung, diketahui pada penelitian ini bahwa Wawasan Kebangsaan peserta didik kurang memuaskan, rentan terpengaruh oleh unsur asing. Keunggulan

penelitian ini dibandingkan penelitian oleh Iskandar Agung adalah peran masyarakat yang baik dan aktif menunjukkan bahwa wawasannya memuaskan.

Syachrumayah Asri, dalam penelitian ini diketahui sarana dan prasarana yang masih rendah dan pelaksanaan kebijakan tidak seluruhnya berjalan baik. Keunggulan dari penelitian ini dari penelitian Syachrumayah Asri adalah pada penelitian ini diketahui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan telah melaksanakan program, kegiatan dengan mengadakan berbagai perlombaan sehingga menghasilkan siswa yang berprestasi dan mampu mewakili daerahnya sendiri.

Very Y. Londa, dalam penelitian ini perlu perbaikan pada penyusunan dan penetapan program yang sesuai kebutuhan karena ada beberapa program yang tidak terlihat perannya. Keunggulan penelitian ini dibandingkan penelitian dari Very Y. Londa adalah program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan berjalan dengan baik dan akan terus dikembangkan.

Bekti Sukesti, pelayanan pendidikan dalam penelitian ini rendah. keunggulan penelitian ini oleh penelitian Bekti Sukesti adalah pelayanan pendidikan yang diberikan baik karena banyak program yang dilaksanakan berjalan sukses.

Siti Muri'ah, pada penelitian ini banyak hal yang kurang mendukung sehingga pendidikan masih rendah. keunggulan dari penelitian ini dibandingkan Siti Muri'ah adalah banyaknya dukungan sehingga pendidikan terus membaik.

Lia Rosliana, Fani Heru W, Wildan Lutfie, Kemal Hidayah dan Tri Noor Aziza, dalam penelitian ini diketahui masih terbatasnya bantuan pemerintah di bidang pendidikan sementara jika dibandingkan dengan penelitian ini diketahui bahwa keunggulannya adalah pemerintah terus berkomitmen memperbaiki pembangunan pendidikan.

Kardius Richi Yosada, dalam penelitian ini diketahui bahwa kesadaran masyarakat rendah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sehingga keunggulan penelitian ini adalah peran masyarakat baik dan aktif dalam meningkatkan kualitas siswa.

Silvia Amanah dan Desi Nurhikmahyanti, penelitian ini menjelaskan bahwa untuk meningkatkan prestasi siswa terkendala oleh aturan pemerintah sementara pada penelitian ini keunggulannya adalah pemerintah memiliki partisipasi dalam meningkatkan kualitas siswa dan melaksanakan banyak program sebagai pendukung agar kualitas siswa terus meningkat.

M Viqy Saputra Misya, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa banyaknya siswa yang putus sekolah masyarakat yang bersuku asli daerah tersebut kurang sosialisasi tentang pendidikan. Keunggulan dari penelitian ini dibandingkan penelitian oleh M Viqy Saputra Misya adalah masyarakat memiliki pengetahuan tentang pentingnya pendidikan sehingga masyarakat ikut berperan dalam meningkatkan kualitas siswa.

Endah Rantau Itasari, pada penelitian ini diketahui bahwa rendahnya keinginan siswa bersekolah, sehingga keunggulan penelitian ini dibandingkan penelitian oleh Endah Rantau Itasari adalah pemerintah melaksanakan program yang menumbuhkan keinginan dan minat siswa untuk bersekolah.

Haerudin, dalam penelitian ini diketahui kualitas pendidikan tidak terjamin, populasi siswa minim. Diketahui keunggulan penelitian ini dibandingkan dengan Haerudin adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen akan terus membangun pendidikan dan populasi siswa banyak yang dapat dilihat dari banyaknya siswa yang ikut berkontribusi mengikuti perlombaan yang diadakan oleh pemerintah daerah.

Aminatul Zahroh, dalam penelitian ini kapasitas sekolah harus terus ditingkatkan. Sementara dalam penelitian ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan penelitian Aminatul Zahroh adalah siswa banyak memiliki kapasitas yang baik berdasarkan hasil prestasi.

Filemon Fajar Kusuma, Edy Saptono dan Effendi Sihole, pengawasan kurang ketat dan banyaknya peredaran narkoba membuat pemerintah harus ekstra memperhatikan pendidikan masyarakat. Keunggulan dari penelitian ini dibandingkan oleh Filemon Fajar Kusuma, Edy Saptono dan Effendi Sihole adalah adanya Kerjasama instansi pemerintah sehingga mampu mengontrol siswa yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki perhatian yang baik terhadap masyarakat.

Trisandi, Ahmad Afrizal Rizqi, pada penelitian ini sumber daya manusia belum semuanya tersedia dan siap. Keunggulan penelitian ini dari penelitian Trisandi, Ahmad Afrizal Rizqi adalah masyarakat yang ikut berpartisipasi atau berperan dalam meningkatkan kualitas siswa sehingga menunjukkan sumberdaya yang siap.

Aylin A'ing, dalam penelitian ini diketahui bahwa bidang pendidikannya mengalami banyak kendala dan kurangnya bimbingan dan pembekalan manajemen belum memenuhi. Keunggulan penelitian ini dibandingkan penelitian oleh Aylin A'ing adalah peran masyarakat yang baik dan aktif menunjukkan bimbingan dan pembekalan sudah memenuhi.

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan gambaran dari teori-teori yang berhubungan masalah Sehingga teori menjadi titik tolak berpijak bagi langkah selanjutnya agar pembahas tidak lepas dari topik yang akan diteliti. Adapun kerangka dasar penulisan teori dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah praktik program-program, kegiatan, jadwal yang sudah dirangkai dan disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk menanggulangi masalah yang ada. Menurut Jusuf Implementasi kebijakan juga dapat diartikan dengan pelaksanaan susunan

konsep dan asas yang menjadi pijakan dan dasar rencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.²

Implementasi kebijakan menurut Subarsono adalah sebuah prosedur untuk melaksanakan kebijakan agar memperoleh hasil. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan adalah proses yang dinamis dimana pelaku kebijakan melakukan kegiatan yang akan memperoleh hasil sesuai dengan sasaran kebijakan tersebut. sebuah keberhasilan dan implementasi kebijakan bisa dilihat berdasarkan proses dan pencapaian akhir berdasarkan tujuan akhir (output).³

Menurut Mazmanian dan Paul Sabatier Implementasi Kebijakan ialah “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya berbentuk Undang-Undang, tetapi juga bisa berupa perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Pada umumnya menyebutkan secara tegas tentang sasaran yang ingin dicapai dan berbagi cara untuk mennyusukan dan mengatur proses implementasi tersebut. Menurut Syafaruddin, Implementasi kebijakan akan berhasil jika pemerintah dapat memperoleh abnyak dukungan terhadap program yang dibuat, lalu mempunyai komunikasi yang baik antara pemerintah dan pengemban

² Skripsi. Fitrianti, Benny (2010). Analisis Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan SMK Negeri Dan Swasta di Kota Yogyakarta Periode 2006-2008, hlm. 18-19

³ Skripsi. Asrul Alamsyah (2013). Analisis Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Gratis di Desa Bontotanga KEc. Bontotiro Kab. Bulukumba, hlm. 8

kebijakan. Apabila hal ini dapat berjalan baik sesuai yang diinginkan, maka implementasi pendidikan akan berjalan sesuai harapan.⁴

Implementasi kebijakan sudah seharusnya dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun swasta, baik secara individu ataupun kelompok agar memperoleh tujuan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, implementasi kebijakan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut badan pengelola yang memiliki wewenang untuk melakukan sebuah program aktivitas, tetapi juga menyangkut faktor-faktor politik, hukum, ekonomi dan sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung yang berpengaruh pada semua pelaku program pendidikan.⁵

Menurut George C. Edwards III, studi Implementasi Kebijakan merupakan hal penting bagi administrasi publik termasuk didalamnya kebijakan publik. Implementasi Kebijakan merupakan tahapan dalam pembuatan kebijakan antara pembuatan kebijakan dan dampak-dampak kebijakan untuk masyarakat yang dipengaruhinya.⁶

Menurut George C. Edwards III dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:⁷

⁴ Skripsi. Duwi Meilina (2016). Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui Wy Kanan, hlm. 20-21

⁵ Skripsi. Nurrisyda Rosyufa (2019). Strategi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya, hlm. 29

⁶ Skripsi. Mulyadi Didi (2016). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Bidang Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2015, hlm 13

⁷ Subarsono (2005), *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 90

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi jika implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Disposisi adalah karakteristik implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan

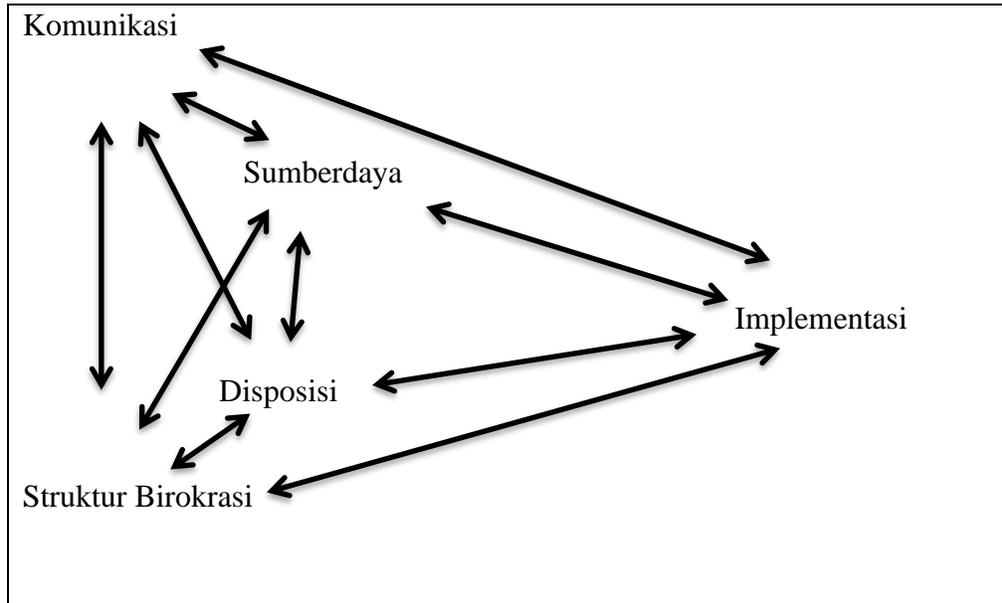
kebijakan dengan baik yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya standar operasi prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Gambar 1.1

Faktor Penentu Implementasi menurut Edward III



Sumber: Edwards III, 1980 148

Secara langsung keempat variabel yang dikemukakan oleh Edward III yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi mempengaruhi implementasi kebijakan. Selain itu secara tidak langsung faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi melalui dampak dari masing-masing faktor. Maka, dengan kata lain masing-masing faktor di atas saling berpengaruh satu dan yang lainnya, kemudian secara bersama-sama mempengaruhi implementasi kebijakan.

Suatu implementasi kebijakan akan berhasil, apabila mencapai tujuan yang diharapkan atau memperoleh hasil. Karena pada prinsipnya suatu kebijakan dibuat untuk memperoleh hasil yang diinginkan yang dapat

dinikmati dan dirasakan oleh pemerintah. Kebijakan hanya sekedar rencana bagus yang tersimpan rapi kalau tidak diimplementasikan .⁸

2. Pendidikan dan Kualitas Siswa

Secara etimologi pendidikan adalah, Paedagogie berasal dari bahasa Yunani terdiri dari kata “PAIS”, artinya anak dan “AGAIN” yang diterjemahkan. Jadi paedagogie yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak. Sedangkan secara definitif yang diartikan para tokoh pendidikan, yaitu menurut John Dewey (Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia), menurut Rousseau (Pendidikan adalah perbekalan yang belum ada manfaatnya pada masa anak-anak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa), dan menurut GBHN (Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup).⁹

Dari pandangan di atas dapat diketahui bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anaknya sehingga timbul interaksi

⁸ Skripsi. Muhammad Nur Muchlis (2010). Implementasi Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2008-2009, hlm. 21

⁹Prof. Zahara Idris MA (1984),”*Dasar-Dasar Kependidikan*”, Angkasa, Bandung. (hal.9-10)

keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung secara terus menerus.

Menurut Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan Indonesia “Pendidikan merupakan tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan.¹⁰

Tujuan pendidikan menurut Islam ialah “membentuk manusia supaya sehat, cerdas, patuh dan tunduk kepada perintah Tuhan serta menjauhi larangannya. Sehingga ia dapat berbahagia hidupnya lahir batin, dunia akhirat. Pendapat oleh para pakar mengenai tujuan pendidikan sebagai berikut: ¹¹

1) Aristoteles (384 - 331 SM)

Tujuan pendidikan menurut Aristoteles ialah “membuat kehidupan rasional. Individual bersama-sama dengan orang-orang lain hendaklah tingkah lakunya selalu dipimpin oleh akal”.

2) Plato (427 – 347 SM)

Tujuan pendidikan menurut Plato adalah “menyajikan individu bahagia dan berguna bagi negara. Di dalam bukunya “Republik”

¹⁰Ki Hajar Dewantara, (2011). ”*Bagian Pertama Pendidikan*”. , Taman siswa, Yogyakarta.(hal.20)

¹¹Drs.H.Abu Ahmadi, Drs. Nur Uhbiyati ,(2015). “*Ilmu Pendidikan*”, Rineka cipta,Jarkarta (hal.99)

berpendapat bahwa tujuan pendidikan ialah mencapai keadilan di dalam negara dengan pimpinan seorang raja yang bijaksana”.

3) John Dewey (AS, 1859 – 1952).

Tujuan pendidikan menurut Dewey ialah “membentuk anak untuk menjadi warga negara yang baik”.¹²

Menurut istilah kualitas berarti mutu yang artinya, tingkat baik buruknya sesuatu. Kualitas banyak diartikan atau didefinisikan oleh para pakar dan berbagai organisasi berdasarkan sudut pandang mereka masing-masing.¹³

Menurut Sallis kualitas atau mutu merupakan sesuatu yang mampu memuaskan dan bahkan melebihi keinginan dan kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. Kualitas atau mutu produk merupakan barang atau produk terbaik yang bisa bertahan dalam setiap persaingan. Menurut Crosby kualitas atau mutu adalah sesuatu yang sesuai dengan standar yang ada. Sebuah produk berkualitas jika memiliki standar sesuai yang telah ditentukan. Feigenbaum kualitas merupakan kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*). Sebuah produk berkualitas jika mampu memberikan kepuasan

¹²Ibid, hlm. 133

¹³ Skripsi. Nur Ifah (2011). Studi Komparasi Antara Kualitas Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMKN 1 Tuban Dan SMKN 1 Tuban di Pon. Pes Manba’il Futuh Jenu, Tuban, hlm. 13

sepenuhnya pada konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen atas sebuah produk.¹⁴

Kesimpulan beberapa definisi yang telah dikemukakan, Nasution (2005) menyatakan, terdapat tiga elemen kualitas yang dapat diterima secara universal, yaitu:¹⁵

- a. Kualitas mencakup usaha dalam memenuhi atau melebihi harapan pelanggan
- b. Kualitas mencakup produk, tenaga kerja, proses dan lingkungan
- c. Kualitas adalah kondisi yang selalu berubah (misalnya, apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang).

Kualitas atau mutu bukan juga dipahami hanya sebatas pada barang atau produk material, karena kualitas atau mutu juga secara lahiriah menyangkut kapasitas dan kompetensi seseorang yang artinya kualitas atau mutu bukanlah sesuatu yang baru, karena kualitas atau mutu merupakan naluri manusia untuk membedakan baik dan buruk. Dengan demikian, kualitas atau mutu merupakan panduan atau standarisasi sifat-sifat dari barang atau jasa, yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan langsung maupun tidak langsung atau yang dinyatakan

¹⁴ Onisimus Amtu, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 118

¹⁵ Onisimus Amtu, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 119

maupun yang tersirat. Kualitas atau mutu tidak bergantung pada tinggi atau rendahnya harga penjualan, melainkan pada kepuasan pelanggan.¹⁶

Kualitas dalam konteks Pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil tes kemampuan akademis. Dapat pula prestasi di bidang lain seperti olahraga, seni dan keterampilan tertentu lainnya.¹⁷

Kualitas pendidikan menurut Ace Suryadi dan H.A.R merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Di dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas atau mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dari konteks “proses” pendidikan yang berkualitas terlibat sebagai input (seperti bahan ajar: kognitif, efektif dan, psikomotorik), metodologi (yang bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. dapat disimpulkan bahwa kualitas atau mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga dan sistem pendidikan dalam memperdayakan sumber-sumber

¹⁶ Onisimus Amtu, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 120

¹⁷ Skripsi. Moh Soleh (2008). *Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam Di SD Islamiyah Warungboto Yogyakarta*, hlm. 18

pendidikan untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan melalui proses yang efektif.¹⁸

Menurut Permadi, mutu jasa pendidikan sifatnya sesuai dengan kebutuhan pelanggan (relatif). Maka dengan kata lain, mutu pendidikan akan dipandang baik atau memuaskan jika sesuai atau melebihi dari kebutuhan pelanggan yang bersangkutan. Dalam pendidikan yang dimaksud dengan pelanggan, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal.¹⁹

- a. Pelanggan internal yaitu orang-orang yang berada dalam sekolah seperti, guru, staf tata usaha, *cleaning service*, dan komponen lainnya.
- b. Pelanggan eksternal yaitu pihak lain yang tidak langsung menerima layanan pendidikan dari sekolah seperti, orangtua siswa, masyarakat, pemerintah dan lain sebagainya.

Menurut PP No. 19 tahun 2005 bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar untuk menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut penjelasan delapan standar tersebut:

- a. Standai isi
- b. Standar proses

¹⁸Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar (1993). " *Analisis Kebijakan Pendidikan*". Remaja Rosdakarya, Bandung. (hal.159)

¹⁹ Skripsi. Nur Ifah (2011). Studi Komparasi Anatra Kualitas Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMKN 1 Tuban Dan SMKN 1 Tuban di Pon. Pes Manba'il Futuh Jenu, Tuban, hlm. 14

- c. Standar kompetensi lulusan
- d. Standar pendidik dan tenaga pendidikan
- e. Standar sarana dan prasarana
- f. Standar pengelolaan
- g. Standar pembiayaan
- h. Standar penilaian pendidikan

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, maka pemerintah harus mempunyai strategi yang bertujuan untuk:²⁰

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memasuki jenjang pendidikan TK, SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi baik swasta maupun negeri.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan.
- c. Meningkatkan mutu lulusan Lembaga pendidikan pada setiap jenjang dan jenis, sehingga dapat memacu peningkatan daya saing sumber daya manusia dalam menghadapi kompetisi dalam kehidupan sosial.

²⁰ Skirpsi. Meitri Prawitasari (2012). Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar Tahun 2009-2010, hlm. 36

Peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan (dasar, menengah dan tinggi), pada dasarnya dipusatkan pada tiga faktor utama, yaitu:²¹

- a. Kecukupan sumber-sumber untuk menunjang proses pendidikan yang artinya penyediaan jumlah dan mutu guru serta tenaga kependidikan lainnya, buku teks bagi murid dan perpustakaan dan sarana serta prasarana belajar.
- b. Mutu proses pendidikan itu sendiri, maksudnya adalah kurikulum dan pelaksanaan pelajaran untuk mendorong para siswa belajar lebih efektif.
- c. Mutu *output* dari proses pendidikan yang berarti keterampilan dan pengetahuan yang telah diperoleh para siswa.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi sekarang dan masa yang akan datang, yaitu pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas baik lulusan yang mempunyai prestasi akademik dan non-akademik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kualitas atau mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga dan sistem pendidikan dalam memberdayakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kualitas

²¹ Skripsi. Awiani (2012). Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Wangi Wangi Di Wakatobi Sulawesi Tenggara, hlm, 18

yang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif.²²

Pengertian siswa menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Siswa adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan.²³

Anak didik/peserta didik atau siswa adalah objek dari pendidikan, sehingga kualitas pendidikan yang akan dicapai tidak akan terlepas dari ketergantungan terhadap kondisi fisik, tingkah laku, dan minat bakat dari siswa. Peningkatan kinerja siswa pada proses pendidikan sangatlah penting, karena pada hakikatnya siswalah yang menjadi pemilik sekolah. Pendidikan tidak lain adalah proses pentransferan ilmu pengetahuan dan ketrampilan kepada siswa serta memotivasi siswa untuk belajar.²⁴

²² Skripsi. Adita Damarika (2016). Efektivitas Program Siswa Pintar Warga Sukowati (SINTAWATI) Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Sragen Tahun 2013-2014, hlm. 21

²³ Skripsi. Rizki Angga Saputra (2018). Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Mutu Peserta Didik Di SMK Darul Maghfiroh Sinar Rejeki Jati Agung Lampung Selatan, hlm. 29

²⁴ Skripsi. Dita Hadiani Finanta (2018). Perencanaan Strategi Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Lulusan Di MTsN 2 Medan, hlm. 17

Minat adalah rasa lebih suka atau ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada suruhan. Minat belajar siswa adalah kecenderungan hati yang tinggi untuk belajar, mendapatkan informasi, pengetahuan, kecakapan, melalui usaha, pengajaran atau pengalaman. Belajar dengan minat akan mendorong siswa untuk belajar lebih baik dari pada belajar tanpa minat, minat pun akan timbul apabila siswa tertarik akan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya, atau saat siswa merasa bahwa sesuatu yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhannya.²⁵

Motivasi belajar siswa adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya yang berupa indikator atau unsur yang mendukung. Hal ini mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²⁶

- a. Adanya Hasrat dan keinginan berhasil
- b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar
- c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan
- d. Adanya penghargaan dalam belajar

²⁵ Skripsi. Laela Istiqomah (2009). Pengaruh Minat Dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri Se Kabupaten Jepara Tahun Ajaran 2008/2009, hlm. 9

²⁶ Skripsi. Titin Purnamasari (2017). Pengaruh Motivasi Dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Memproses Perjalanan Dinas Siswa Kelas XI Administrasi Perkantoran SMK Muhammadiyah 2 Bantul Semester Gasal Tahun ajaran 2016/2017, hlm. 11

- e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar
- f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik.

Dalam penilaian kompetensi siswa diadakan tes kemampuan akademik yang dalam hal ini Ujian Sekolah dan Ujian Nasional (UN). Dimana Ujian Sekolah dan Ujian Nasional adalah alat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam Permendiknas No. 78 tahun 2008 Pasal 2 menyatakan bahwa Ujian Nasional bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara Nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Alasan UN perlu dilaksanakan dinyatakan pada Pasal 3, karena Hasil UN digunakan sebagai salah satu pemetaan kualitas satuan dan/atau program pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang berikutnya, penentuan kelulusan siswa dari program dan/atau satuan pendidikan, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.²⁷

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa kualitas siswa merupakan kemampuan dan penilaian baik buruknya hasil belajar atau prestasi yang dimiliki siswa dalam pemberdayaan sumber-sumber yang diperoleh untuk

²⁷ Skripsi. Vera Mei Ringgwati (2016). Strategi Keplaa Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Lulusan (Studi Multisitius Di SMAN 1 Blitar Dan SMAN 1 Sutojayan), hlm. 60

meningkatkan kualitas sesuai dengan tujuan dan standar penilaian yang digunakan.

3. Daerah Perbatasan

Daerah perbatasan menurut pemaparan (DPA-RI, Jakarta 1 Maret 1994) wilayah perbatasan merupakan kawasan khusus karena perbatasan dengan wilayah tetangga, sehingga penanganan pembangunan pun memerlukan kekhususan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga baik berbatasan di darat maupun di laut. Negara yang berbatasan darat dengan Indonesia antara lain Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Sedangkan negara yang berbatasan laut dengan Indonesia yaitu, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Pulau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste.²⁸

Menurut Peraturan Badan Pengelola Perbatasan Tentang Rencana Aksi Pengelola Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 pada pasal 1 ayat (9) yaitu: wilayah negara adalah suatu unsur negara merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah bawahnya, serta ruang udara atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya, dan pada ayat (10) yaitu: kawasan perbatasan merupakan bagian wilayah negara yang terletak pada sisi sepanjang batas wilayah negara

²⁸Lutfi Muta'ali, Djaka Marwasta, Joko Chrisnanto, (2014) “ *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*”, Gajah Mada University Pers. (hal.2)

Indonesia dengan negara lain, dalam hal wilayah batas darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.²⁹

Dalam Undang-Undang 1956 (Amandemen) pada Bab IXA, Pasal 25 A Wilayah Negara yaitu; “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya telah ditetapkan dalam undang-undang”. Bentuk wilayah negara Indonesia berdasarkan teorinya termasuk *divided or siparated*, yaitu negara terpisah oleh wilayah laut atau sepotong oleh negara lain (negara yang wilayahnya dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan daratan-daratannya dipisah-pisahkan oleh laut.³⁰ Indonesia sebagai negara kepulauan, batas-batas wilayah negara sebagian diatur dalam UNCLOS 1982 yang kemudian telah ratifikasi melalui Undang-Undang No. 17 Tentang ratifikasi UNCLOS 1982, sebagian diatur dalam perjanjian-perjanjian antara Indonesia dengan Negara Tetangga seperti, Malaysia, Australia, Papua New Guinea, Timor Leste, dan Vietnam. Perjanjian-perjanjian tersebut itulah yang menjadi dasar dalam penetapan batas Wilayah Negara Republik Indonesia., dalam ruang lingkup yurisdiksi Negara atas suatu wilayah, maka secara garis besar Wilayah Negara dan bagian-bagian yaitu sebagai berikut :

- a) Wilayah Daratan Termasuk Tanah di bawahnya.

²⁹Peraturan Badan Pengelola Perbatasan Tentang Rencana Aksi Pengelola Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 pada pasal 1 ayat (9)

³⁰Undang-Undang 1956 (Amandemen) pada Bab IXA, Pasal 25A Wilayah Negara

Wilayah daratan adalah bagian dari wilayah negara di mana rakyat atau penduduk negara yang permukiman dan diwilayah daratan itu pemerintahan negara melaksanakan dan mengendalikan pemerintahannya dan Wilayah antar dua negara berupa sungai yang mengalir di perbatasan Wilayah negara-negara bersangkutan dan juga sungai tersebut ditetapkan pada garis pada bagian dalam terdalam aliran sungai yang disebut thalweg. Ruang lingkup wilayah daratan adalah tanah daratan, mengenai batas kedalaman dari tanah di bawah Wilayah daratan merupakan bagian wilayah negara yang pengaturannya dalam hukum internasional positif. Kedaulatan negara atas tanah di bawah wilayah daratannya sampai ke dalam yang tidak terbatas, kedaulatan tersebut meliputi sumber daya yang terkandung di dalamnya.

b) Wilayah Perairan

Ketentuan tentang Laut Teritorial dan Zona tambahan ini diatur dalam pasal 3 dan pasal 33 United on the law of the sea (UNCLOS) yang diadakan oleh PBB tahun 1982. Indonesia sendiri mengeluarkan Undang-Undang Tahun 1985 mengenai ratifikasi UNCLOS. Dalam ketentuan ini, laut teritorial tidak

melebihi batas 12 mil lau diukur garis angka normal. Untuk negara-negara kepulauan tang mempunyai karang-karang di sekitarnya, garis pangkalnya adalah garis pasang surut dari sisi karang ke arah laut. Bagian ini juga membahas tentang perairan kepulauan, mulut, sungai, teluk, instalasi pelabuhan. Penetapan garis laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan serta lintas damai. Mengenai zona tambahan, menentukan bahwa Negara pantai dalam zona tersebut bisa melaksanakan pengawasan yang diperlukan guna mencegah pelanggaran undang-undang menyangkut Bea Cukai, Fiskal, Imigrasi, dan Saniter dalam wilayahnya, namun tidak boleh lebih dari 24 mil laut.

c) Wilayah Dasar Laut dan Tanah Dibawah-Nya yang Terletak Di bawah Wilayah Perairan

Wilayah negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan, berarti negara memiliki kedaulatan terhadap dasar laut dan tanah dibawah-Nya segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah menjadi hak dan kedaulatan sepenuhnya dari negara yang bersangkutan.

d) Wilayah Ruang Udara

Ruang udara yang merupakan bagian dari wilayah negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah

daratan dan di atas wilayah perairan negara yang bersangkutan dengan kata lain wilayah daratan dan lautan secara vertikal tidak di batasi sepanjang dipertahankan oleh negara tersebut. Keadaan sekarang sudah makin sukar untuk mempertahankan wilayah udara negara yang tinggal di angkasa luar, karena kemajuan teknologi modern, misalnya sputnik, Apollo, Chaelenger memiliki kemajuan (adi kuasa) dapat mengelilingi bumi beberapa kali melalui banyak tanpa izin terlebih dahulu kepada negara lain.³¹

F. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional dimaksud untuk memberikan gamabran secara jelas mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Ada beberapa konsep yang merupakan hasil pengenalan yang telah lama berlangsung adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan dari rancangan program atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan kebijakan yang telah disetujui.

2. Kualitas Siswa

³¹Undang-Undang No. 17 Tahun 1982 Tentang *Ratifikasi UNCLOS*

Kualitas Siswa adalah penilaian hasil belajar atau prestasi siswa yang mampu memuaskan sesuai dengan tujuan dan standar penilaian yang digunakan baik dalam prestasi akademis dan non-akademis.

3. Daerah Perbatasan

Daerah Perbatasan adalah suatu daerah yang wilayahnya berada pada batas-batas negara dan langsung berhadapan dengan negara tetangga. Perbatasan suatu wilayah meliputi batas darat, laut dan udara, wilayah yang dimaksud adalah bagian wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah bagaimana cara mengukur atau melihat suatu variabel sehingga arah penelitian baik dan jelas. Adapun definisi operasional dari variabel yang digunakan, sebagai berikut.

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas siswa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan agar mencapai hasil dengan menggunakan variabel menurut George C. Edwards III, yaitu:

1. Palaksanaan implentasi kebijakan diperlukan komunikasi untuk menentukan sasaran yang jelas, peningkatan kualitas siswa yang sudah di tentukan dengan program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan indiktornya:

- a. peningkatan Sarana Dan Prasarana
 - b. Penambahan Tenaga Pendidik
 - c. Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas
 - d. Pembagunan Karakter
2. Implementasi kebijakan Peningkatan kualitas siswa membutuhkan sumber daya agar berjalan efektif dengan indikatornya:
 - a. Peran Masyarakat
 - b. Kerjasama instansi-instansi

H. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah pada Kecamatan Sebatik Tengah dan Dinas Pendidik Kabupaten Nunukan. Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Sebatik Tengah dikarenakan kecamatan ini merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan kota Tawau salah satu kota dari Negara Malaysia, masyarakat pada daerah tersebut sering melakukan kegiatan sosial pada warga negara tetangga, Penulis menyadari bahwa masyarakat Kecamatan Sebatik Tengah membutuhkan peningkatan kualitas siswa guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas agar masyarakat setempat dapat menjalankan kegiatan sosial secara baik dan mengurangi adanya konflik. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis hanya membatasi masalah pada kajian Kebijakan Pemerintah Daerah yang akan meningkatkan kualitas siswa pada Kecamatan Sebatik Tengah. Agar pembahasan dalam skripsi terfokus dan tidak melebar.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan sifat karakter permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sehingga metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian, seperti individu, lembaga, kelompok, dan masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya. Ciri-ciri yang terdapat dalam penelitian deskriptif adalah: Pertama memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah-masalah aktual. Kedua data-data yang dikumpulkan pertama-tama disusun, dijelaskan, dan kemudian di analisa.³²

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (atau pun yang terkait dengannya) yang kita peroleh langsung dari unit analisa yang di jadikan sebagai obyek penelitian.³³ Data primer dalam

³² Hadari Nawawi (1985). "*Metode Penelitian Bidang Sosial*", penerbit UGM prs, Yogyakarta, (hlm. 63)

³³Eka Rahmawati, Dian (2011). *Diktat mata kuliah metode penelitian sosial*.

penelitian ini adalah data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan mengenai peningkatan Kualitas Pendidikan di kecamatan Sebatik Tengah.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah semua data yang kita peroleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen atau arsip yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa daya yang dijadikan obyek.³⁴ Data sekunder dalam penelitian ini seperti berupa data renstra dinas pendidikan dan program-program dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

3. Unit Analisis Data

Unit analisa dalam penelitian ini adalah, Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, yang di mana tempat melekatnya permasalahan yang dipelajari penelitian ini, dan sekaligus sebagai sumber data karena darinya dapat diperoleh data dan juga sebagai informan karena dianggap memiliki informasi dan akses terhadap objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendukung penelitian. Adapun penjelasan cara-

³⁴Ibid

cara penelitian dalam mengumpulkan data sebagai analisa dasar dalam menentukan hasil penelitian sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi serta ide melalui proses tanya jawab, sehingga dapat menyimpulkan makna dalam suatu topik tertentu³⁵. Wawancara dsebagai teknik pengumpulan data agar dapat mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam. Responden dalam penelitian ini yaitu Dinas pendidikan kepala sekolah dan masyarakat.

b. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data mengenai konsep penelitian di dalam unit analisa penelitian yang dilakukan pengamatan secara langsung.³⁶ Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kualitas pendidikan pada Kecamatan Sebatik Tengah serta Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.

³⁵Ibid

³⁶Ibid

c. Dokumentasi

Dokumentasi Merupakan pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep di dalam unit analisa data yang dijadikan objek penelitian. Contoh sumber data : dokumen, resmi, media massa cetak, jurnal dan sebagainya.³⁷

5. Teknis Analisis Data

Menurut Patton, teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian yang terdiri dari:

a) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

³⁷Ibid

b) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks.